LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2024
(LKPJ)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Yang senantiasa memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita sekalian sehingga laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan realisasi capaian dalam tahun 2024.

Semoga laporan ini dapat memberikan motivasi bagi seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kualitas kerja sesuai tugas pokok dan fungsi guna mewujudkan kepemerintahan yang baik, Aamiin.

Benteng, 20 Februari 2025

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MASSAILE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP . 19650806 199402 1 003

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR ……. … i

DAFTAR ISI ... ……..…… ii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum ……..... 1

1.2 Struktur Organisasi dan Tufoksi.....……..2

1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, kualifikasi pendidikan, pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat struktural 6

BAB II. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program & Kegiatan…….. 8

2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pel. Program,

2.1.2 Kegiatan & Sub Kegiatan 8

2.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan IKU……..…..... 19

2.1.4 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan……..……..20

2.1.5 Analisis kesusaian antara kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 23

2.1.6 Inovasi.....24

2.1.7 Prestasi dan penghargaan.....24

2.2 Kebijakan Daerah (Perda, Perbup, & Keputusan Bupati yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah.....25

2.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati TA. 2024 26

BAB III. PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memiliki tugas dan fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam pengembangan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dalam Peraturan Daerah ini urusan Keluarga Berencana diintegrasikan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan dalam satu lembaga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terletak di Jl. S. Siswomiharjo No. 9 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Titik Koordinat -6.11853, 120.46408. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai dinas yang melaksanakan kewenangan di bidangnya, diharapkan nantinya dapat mendampingi masyaraakat terutama kelompok-kelompok perempuan untuk dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar melalui pelayanan dengan program-program khusus yang dimilikinya.

Pengelolaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangat diharapkan mampu menunjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menjadi Daerah Kabupaten Kepulauan yang maju dan sejahtera dengan penduduk yang memiliki kualitas yang dapat diandalkan untuk pengelolaan sumber daya yang ada. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang terstruktur dan

terintegrasi dengan kegiatan pembangunan melalui perencanaan yang strategis untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi setiap saat agar tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diemban oleh Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.2. STUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

II. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub. Bagian Program
2. Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
3. Sub. Bagian Keuangan.

III. Bidang Peningkatan Kualitas Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

IV. Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

V. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

VI. Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

VII. UPTD

VIII. Jabatan Fungsional;

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

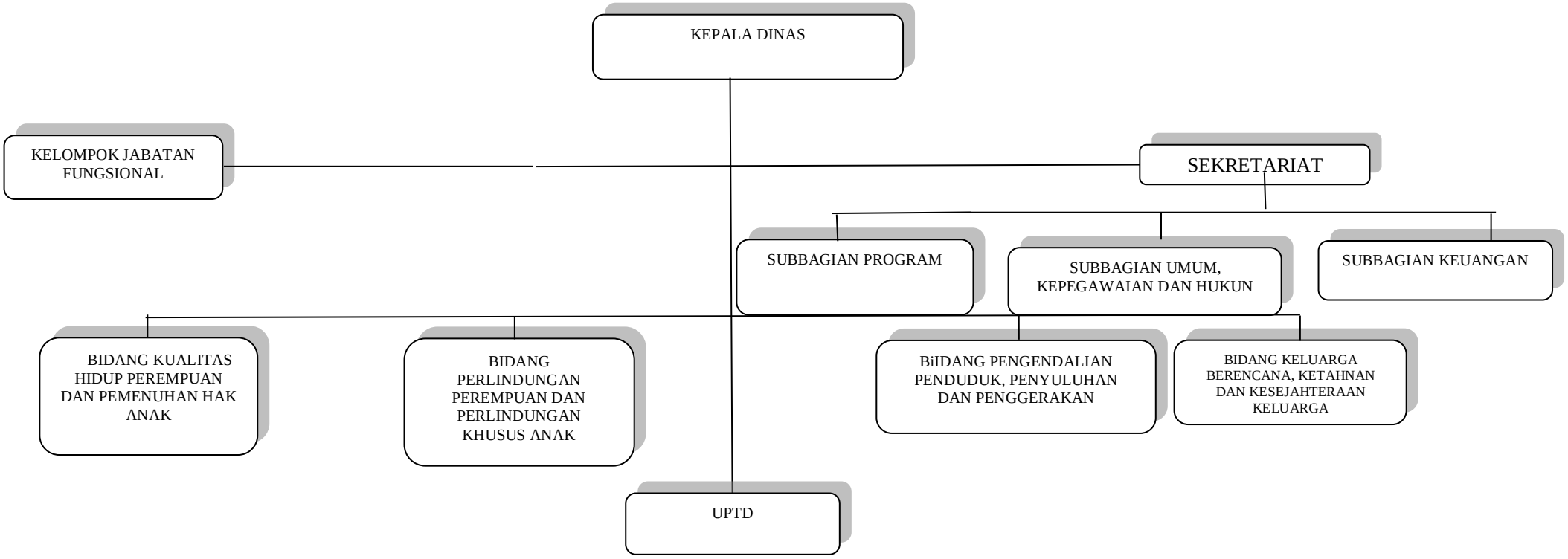

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan fungsional di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
c. Pelaksanaan koordinasi terhadap kelancaran kegiatan instansi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
d. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, kesekretariatan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

1.3. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL

1. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebanyak 103 orang terdiri dari PNS sebanyak 30 orang, Penyuluh KB Pegawai Pusat sebanyak 17 orang, Pegawai Tidak tetap (PTT) sebanyak 49 orang dan P3K 8 orang.

2. Kualifikasi Menurut Pendidikan

Tabel.Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan

Pendidikan	Jumlah
S3	1
S2	2
S1	19
D III	0
SMA	8
JUMLAH	**30**

3. Klasifikasi menurut Pangkat dan Golongan

Tabel. Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina Tk.I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	3
3.	Penata Tingkat I (III/d)	12
4.	Penata (III/c)	0
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2
6.	Penata Muda (III/a)	6
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	4
8.	Pengatur (II/c)	0
9.	Pengatur (II/b)	0
10.	Pengatur Muda(II/a)	0
JUMLAH		**30**

4. Jumlah Pejabat Stuktural dan Fungsional

Tabel.Pejabat Stuktural dan Fungsional

Jabatan	Jumlah	Ket.
Eselon II/a	0 orang	
Eselon II/B	1 orang	
Eselon III/A	1 orang	
Eselon III/B	4 orang	
Eselon IV/A	6 orang	
Eselon IV/B	1 orang	
Fungsional	5 orang	Pegawai Pusat 14 Org
		P3K 24 Orang
Pelaksana	12 orang	
Jumlah	**30**	**38**

DP3AP2KB mempunyai 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), yaitu UPTD Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) dan UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah pelaksana koordinasi kegiatan operasional program DP3AP2KB Kabupaten Kepulauan Selayar di wilayah kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pelayanan Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. UPTD wilayah I : Kecamatan Bontomatene dan Buki
2. UPTD wilayah II : Kecamatan Bontomanai dan Benteng
3. UPTD wilayah III : Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu
4. UPTD wilayah IV : Kecamatan Takabonerate
5. UPTD wilayah V : Kecamatan Pasimarannu
6. UPTD wilayah VI : Kecamatan Pasilambena
7. UPTD wilayah VII : Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1.1. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN T.A 2024

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	100%	89, 67%			
					12,954,547,000	**9,952,060,274**			
1	**BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**	**RKPD TAHUN 2023**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	100%	**76,28**			
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	**5,040,937,700**	**4,721,062,056**			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	**100%**	**93,65**			
					4,636,945,100	**4,376,244,556**			
				Kegiatan :	**100%**	**74,99**			
				Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***28,,227,300***	***21,166,900***			
				Sub Kegiatan :					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19,789,400	13,739,200			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,525,400	1,237,900			

				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,700,700	1685,500			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1,512,200	1,431,700			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1,172,400	852,400			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	2,527,200	2,220,200			
				Kegiatan :	100%	**94,58**			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***3,304,660,000***	**3,125,587,175**			
				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,271,100,000	3,094,281,475			
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30,720,800	28,892,100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangnan Akhir Tahun SKPD	1,629,600	1,414,600			
				Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,209,600	999,000			
				Kegiatan :	100%	**95,75**			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	***10,825,000***	***10,380,000***			
				Sub. Kegiatan					
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	*10,825,000*	*10,380,000*			
				Kegiatan :	100	**89,46**			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***15,000,000***	***15,000,000***			
				Sub Kegiatan :					
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*15,000,000*	*13,419,000*			

				Kegiatan :	100%	98,29			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	***371,462300***	***365,114,560***			
				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1,857,000	1,857,000			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17,000,000	14,318,000			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,818,000	6,778,000			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5,941,800	3,863,700			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2,175,000	2,175,000			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	3,450,000	3,450,000			
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	334,220,500	332,672,860			
				Kegiatan :	100	94,74			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**355,500,900**	**336,850,000**			
				Sub Kegiatan :					
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	340,000,900	321,350,000			
				Pengadaan Mebel	15,500,000	15,500,000			
				Kegiatan :					
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**100**	**96,43**			
				Sub Kegiatan :					

				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,529,300	1,087,000			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95,097,500	86,598,121			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	210,332,800	208,322,000			
				Kegiatan :	100	**85,02**			
				Pemelilharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	**244,310,000**	**207,719,800**			
				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36,130,000	34,394,000			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	145,880,000	111,247,800			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11,000,000	10,831,000			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	51,300,000	51,247,000			
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	**100**	**92,66**			
					98,110,900	90,913,400			
				Kegiatan :	100	80,11			
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	25,000,100	20,027,400			
				Sub Kegiatan :					

				Advokasi kebijakan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	25,000,000	20,027,400			
				Kegiatan :	100	96,96			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	73,110,800	70,886,000			
				Sub Kegiatan :					
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	73,110,800	70,886,000			
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**100**	**84,46**			
					29,999,900	25,339,300			
				Kegiatan :	**100**	**84,46**			
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29,999,900	25,339,300			
				Sub Kegiatan :					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhdap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29,999,900	25,339,300			
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	100	89,24			
					22,197,200	19,809,400			
				Kegiatan :	100	89,24			
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	22,197,200	19,809,400			

				Sub Kegiatan :					
				Pelaksanaan Komunikasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22,197,200	19,809,400			
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**100**	**81,21**			
					29,999,900	24,364,300			
				Kegiatan :	**100**	81,21			
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29,999,900	24,364,300			
				Sub Kegiatan :					
				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	29,999,900	24,364,300			
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	100	84,46			
					78,681,400	56,220,700			
				Kegiatan :	100	95,11			
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan DUnia Usaha Kewenagan Kabupaten/Kota	33,681,400	32,036,000			
				Sub Kegiatan :					
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	33,681,400	32,036,000			
				Kegiatan :	100	53,74			

				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	**45,000,000**	**24,184,700**			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	45,000,000	24,184,700			
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	100	88,39			
					145,000,300	128,170,400			
				Kegiatan :	100	87,61			
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melbatkan para Pihak Lingkup Daerah Kab/Kota	**120,000,100**	**105,137,400**			
				Sub Kegiatan :					
				Penguatan Kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan Kab/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, Sesa/Kel. Layak Anak dan DRPPA	120,000,100	105,137,400			
				Kegiatan :	**100**	**92,13**			
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	**25,000,200**	**23,033,000**			
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25,000,200	23,033,000			
2	**BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**	**RKPD 2023**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	100	66,10			
					7,913,612,300	**5,230,998,218**			

				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	100	84,55			
					113,000,000	95,540,600			
				Kegiatan :	100	84,55			
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabuapten/Kota	113,000,000	95,540,600			
				Sub Kegiatan :					
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	18,000,000	15,075,400			
				Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	35,000,000	33,047,000			
				Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelapotran Program KKBPK	60,000,000	47,418,200			
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	100	62,77			
					6,782,855,100	4,257,745,218			
				Kegiatan :	100	79,65			
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (kie) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**1,779,849,600**	**1,417,610,318**			
				Sub Kegiatan :					
				Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	701,267,500	524,298,600			
				Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100,000,000	98,602,000			
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	165,000,000	163,610,000			

				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	699,628,400	545,047,018				
				Pengendalian Program KKBPK	113,953,700	86,052,700				
				Kegiatan :	100	91,84				
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**693,261,000**	**685,240,000**				
				Sub Kegiatan :						
				Penyediaan Sarana Pendukkung Operasiona; PKB/PLKB	118,461,000	112,840,000				
				Penggerakan Kader Institusi Pedesaan (IMP)	574,800,000	572,400,000				
				Kegiatan :	100	92,24				
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1,739,936,000	1,556,859,900				
				Sub Kegiatan :						
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1,427,500,000	1,426,850,000				
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	268,836,000	98,705,000				
				Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas KEsehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13,600,000	12,742,00				

				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	30,000,000	18,562,900			
				Kegiatan :	100	23,27			
				Pendayagunaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ber-KB	**2,569,808,500**	**598,035,000**			
				Sub Kegiatan :					
				Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1,407,945,500	111,000,000			
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	1,161,863,000	487,035,000			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	100	86,24			
					1,017,757,200	**877,712,400**			
				Kegiatan :	100	86,24			
				Pelaksnaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	**1,017,757,200**	**877,712,400**			
				Sub Kegiatan :					
				Pengadaan Sarana Kelompok kegiatann Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	300,000,000	232,750,000			

				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengolala dan Pelaksana Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK_R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UUPKS)	661,500,000	590,252,500			
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	56,257,200	54,709,900			

2.1.2. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DP3AP2KB

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Ket.
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
1	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	1. Persentase Partisipasi Perempuan dilembaga pemerintah	%	13,74	0,087	0,006	Bid. Kualitas Hidup Perempuan dan pemenuhan Hak Anak
	2. Partisipasi Perempuan dilembaga Swasta	%	43,72	0,427	0.097	Bid. Kualitas Hidup Perempuan dan pemenuhan Hak Anak
	3. Rasio KDRT	%	2.19	2	0,00005	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
	4. Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	42,85	56,03	1,307	Bid. Kualitas Hidup Perempuan dan pemenuhan Hak Anak
	5. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak tindakan kekerasan	100%	0,56	11	19,64	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
2.	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
	1. Rata – rata jumlah anak perkeluarga	%	2	1,9	0,95	Dalduk
	2. Rasio akseptor KB Baru	%	47	52,35	1,113	Dalduk
	3. Cakupan Peserta KB Aktif	%	12,11	51,08	4,21	Dalduk

2.1.3. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN TAHUN 2024 DP3AP2KB

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
1	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	1. Persentase ARGH pada Belanja Langsung APBD	%	26	0,79	32,91	Bid. Kualitas Hidup Perempuan dan pemenuhan Hak Anak
	2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	9	0.09	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
	3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	0,40	-	-	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
	4. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	OPD	28	-	-	Bid. Kualitas Hidup Perempuan dan pemenuhan Hak Anak
	5. Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	OPD	48	28	58,33	Bid. Kualitas Hidup Perempuan dan pemenuhan Hak Anak
	6. Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		4	-	-	Tidak di anggarkan
	7. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar	Lembaga	10	-	-	Bid. Perlindungan

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
	pelayanan minimal					Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
	8. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Orang	12	9	0,75	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
	9. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Lembaga	2	2	100	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
	10. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	Lembaga	2	2	100	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
	11. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Ormas	28	-	-	Tidak di anggarkan
	12. Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	Orang	105	-	-	Tidak di anggarkan
	13. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Ormas	28	-	-	Tidak di anggaran
	14. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	Unit	2	2	100	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
	15. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap	-	-	-	-	Belum ada

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
	perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi					kebijakan/Perbup
	16. Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	-	0,06	-	-	Belum ada lembaga di Kep. Selayar
	17. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	%	0,023	2	8,69	Bid. Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
2	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	1. TFR (Angka Kelahiran Total)		2,08	2,1	1,009	Bid. Dalduk
	2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	72,84	65,35	86,97	Bid. Dalduk
	3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,15	7,49	91,90	Bid. Dalduk
	4. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		1 Dok	-	-	Tidak Tersedia
	5. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	%	21	>20	90,47	Bid. Dalduk
	6. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	%	13245	241	1,81	Bid. Dalduk
	7. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK	%	3.051	12502	409	Bid. Dalduk

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Keterangan
1	2		3	4	5=(4/3)*100	6
	(advokasi dan KIE)					
	8. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	%	21	21	100	Bid. Dalduk
	9. Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Faskes	17 Faskes	19	11,17	Bid. Dalduk
	10. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	12.133	3693	30,43	Bid. Dalduk
	11. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Pokja Kampung KB	88	88	100	Bid. Dalduk
	12. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	%	2.643	1716	64,92	Bid. Dalduk
	13. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	%	306	90	3,4	Bid. Dalduk
	14. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	%	10.233	12896	1,26	Bid. Dalduk

2.1.4. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DP3AP2KB

No.	UrusanPemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	**2**	**3**	**4**	**5=4-3**	**6=(4/3)*100**	**7**	**8**	**9**	**10**
1.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	Rp. 12,954,547,000,-	Rp 9,952,060,274,-	Rp 3,002,486,726,-	76,82	10			
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Rp. 5,040,934,700,-	Rp 4,721,062,056,-	Rp 319,872,644,-	79,42	7	51,58	17	96,23
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp 7,913,612,300,-	Rp. 5,230,998,218,-	Rp. 2,682,614,082,-	66,10	3	87,05	6	89,75

2.1.5. INOVASI

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
1	-	-	-	

2.1.6. PRESTASI/ PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	KABUPATEN LAYAK ANAK (PREDIKAT MADYA) TAHUN 2022		√			KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	
2.	KABUPATEN LAYAK ANAK (PREDIKAT MADYA) TAHUN 2023		√			KEMENTERIAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	

2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN TAHUN 2024

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
1.	UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	No. 18 TAHUN 2023 Tanggal, 24 Juli 2023	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak	Tujuannya untuk memberikan layanan kepada Perempuan dan Anak yang mengalami Kekerasan, diskriminasi, intimidasi dan bentuk – bentuk kekerasan lainnya yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.	
2.	PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK	No. 433/X/TAHUN 2024 Tanggal, 07 Oktober 2024	Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Tahun 2024 - 2026	Tujuannya sebagai regulasi dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan anak yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar	
3.	TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	No. 27/I/TAHUN 2024 Tanggal, 02 Januari 2024	Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar	Tujuannya untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Selayar	
4	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER TERMASUK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER	No. 359/VIII/Tahun 2024, Tanggal, 01 Agustus 2024	Pembentukan Tim Pelaksana serta penunjukan Narasumber dan moderator kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menyusun anggaran responsif gender (ARG)	

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	4	5
1.			

BAB III

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan Pertanggung jawaban kinerja dalam pencapaian visi dan misi lembaga yang dibuat setiap tahun anggaran berakhir dan bertujuan untuk perbaikan manajemen kepemerintahan di lingkungan instansi pemerintah.

Permasalahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian target kinerja adalah terbatasnya sarana dan prasarana kantor, jumlah sumber daya aparatur yang dimiliki masih kurang untuk mendukung pelaksanaan program di seluruh Desa dan Kecamatan.

Untuk mengantisipasi kendala yang ada, maka dilakukan berbagai upaya dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada namun, tetap mengusahakan sarana prasarana yang layak dan memadai. Meningkatkan sumber daya aparatur dengan mengikutkan berbagai pelatihan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dengan adanya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Kami menyadari penyusunan LKPJ ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan kami perlukan untuk perbaikan penyusunan LKPJ ini.

Benteng, 20 Februari 2025

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI MASSAILE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650806 199402 1 003